

MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Sasaran Program	Meningkatnya Kapabilitas Instansi Pemerintah dalam Manajemen ASN dan Profesionalitas Pegawai ASN berbasis
Deskripsi Sasaran Program	Peningkatan kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN serta profesionalitas pegawai berbasis meritokrasi merupakan prioritas strategis pemerintah. Prinsip meritokrasi memastikan keputusan dalam rekrutmen, pengembangan, dan promosi ASN didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas secara objektif. Langkah konkret seperti seleksi berbasis kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan disertai proses mekanisme evaluasi kinerja yang transparan dan adil dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Sebagai hasilnya ASN yang profesional mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, mendukung pembangunan nasional, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah
Indikator Kinerja Program	IKP 1.Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja II
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN Kegiatan pembinaan ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi. Formula $N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang Dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan

Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru
Unit Penanggung jawab IKP	Seluruh unit kerja / Kelompok kerja
Sumber Data	- Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN - Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN - Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Resiko	
Mitigasi Resiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	N/A	N/A	100 %							

MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, meliputi : a. Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN. b. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN, bimbingan teknis dan advokasi kepada para pemangku kepentingan
Indikator Kinerja Program	IKP 2. Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi Ukuran ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang diselenggarakan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN melalui beberapa unit kerja di bawahnya, antaranya 1. Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier Aparatur Sipil Negara; 2. Direktorat Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara; 3. Direktorat Disiplin, Budaya Kerja dan Citra Institusi Aparatur Sipil Negara; dan 4. Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen Aparatur Sipil Negara Pengukuran disesuaikan dengan Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Formula Formula: $IKM = \left(\frac{\text{Nilai rata-rata seluruh unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \times 25 \right)$
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang diselenggarakan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan manajemen ASN
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru
Unit Penanggung jawab IKP	Sekretariat Deputi
Sumber Data	Laporan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi Publik
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata

Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Resiko	Potensi instansi atau responden tidak mengisi survei yang diberikan
Mitigasi Resiko	Monitoring dan distribusi SKM setiap pelayanan kepegawaian dan dengan metode berbeda

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	94	86,78	94,25		94,5		94,75		95	

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, meliputi : a. Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN. b. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN, bimbingan teknis dan advokasi kepada para pemangku kepentingan
Indikator Kinerja Program	IKP 3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kebijakan Teknis Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi Pemenuhan kebijakan teknis Pembinaan Penyelenggaraan penyelenggaraan Manajemen ASN bermakna bahwa Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN. Penyusunan kebijakan teknis ini digunakan dalam rangka pengelolaan ASN untuk pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berorientasi pada pelayanan. Rumusan kebijakan teknis yang disusun meliputi substansi: 1. Pengembangan Talenta dan Karier ASN 2. Kinerja dan Penghargaan ASN; 3. Disiplin, Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN; dan 4. Jabatan Fungsional Manajemen ASN Formula

	Membandingkan Jumlah rumusan kebijakan teknis yang disusun dengan jumlah kebijakan teknis yang direncanakan $N = \frac{A}{B} \times 100$ N = Persentase Tersusunnya rumusan kebijakan teknis di Deputi Bidang PPMASN A = Jumlah rumusan kebijakan teknis yang telah disusun B = Jumlah rumusan kebijakan teknis yang direncanakan Adapun rumusan yang direncanakan antara lain 1. Modul JF Dosen 2. Pedoman Pembinaan Kinerja 3. Panduan instansi pembina untuk menyusun modul SKP Jabatan Fungsional 4. Panduan perilaku 5. mobile ekin 6. modul e kinerja harian 7. modul pengelolaan kinerja di platform ruang GTK 8. panduan bagi instansi untuk mengevaluasi penilaian kinerja berbasis hasil 9. panduan bagi kantor regional untuk menilai pengelolaan kinerja di instansi wilayah kerja 10. panduan evaluasi penghargaan pegawai ASN 11. Materi Muatan Rumusan Kebijakan RPP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 - substansi pemberian THR dan gaji 13 bagi pegawai ASN tahun 2026 - Substansi pemberian kepada penerima pensiun 12. Materi Muatan Rumusan Kebijakan Penghargaan dan Pengakuan (bahan penyusunan RPP), meliputi - Substansi Gaji - Substansi Tunjangan Jabatan/Individu - Substansi Penghargaan yang bersifat Motivasi (Motivational Reward) - Substansi Bantuan Hukum 13. Materi muatan RPP JPHT - Substansi sistem jaminan pensiun hari tua ASN - Simulasi perhitungan dampak fiskal JPHT ASN 14. Materi muatan JKK JKM 15. Revisi Perban 4 Tahun 2020 16. Materi Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi pegawai ASN 17. Rumusan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Manajemen ASN. 18. Rumusan Penyesuaian Regulasi Jabatan Fungsional Manajemen ASN 19. Rumusan Pedoman Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Manajemen ASN 20. Draft Pedoman Pembinaan JF MASN 21. Rumusan Kebijakan Teknis Disiplin ASN 22. Rumusan Kebijakan Teknis Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN 23. Rumusan Kebijakan Teknis Pemberhentian ASN
Tujuan	Kebijakan teknis ini memberikan pedoman terhadap hal-hal yang bersifat teknis sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya serta merupakan bentuk kewenangan BKN yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome ☒ Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	☒ Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru
Unit Penanggung jawab IKP	Sekretariat Deputi
Sumber Data	Pengajuan rencana kebijakan teknis dari Direktorat di Deputi PPMASN
Jenis Penghitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir () Rata-rata

Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	() Maximize () Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Resiko	Proses penyelesaian rumusan kebijakan teknis pembinaan Manajemen ASN tidak sesuai target.
Mitigasi Resiko	1. Melakukan pemetaan tingkat urgensi penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan Manajemen ASN 2. Melakukan perencanaan terintegrasi sehingga target-target dapat tercapai.

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	100%	100%	100%		100%		100%		100%	

MANUAL INDIKATOR KINERJA

LEVEL 1

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, meliputi : a. Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN. b. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN, bimbingan teknis dan advokasi kepada para pemangku kepentingan
Indikator Kinerja Program	IKP 4. Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari kerja di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri. Apabila terdapat surat yang memiliki kurun waktu atau masa tenggat waktu permintaan tindaklanjuti/respon kurang dari atau lebih dari 4 hari kerja, maka selama dapat memenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut maka dihitung telah memenuhi SLA 4 hari kerja. Formula $N = A/B \times 100\%$ N= Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari kerja di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara A = Jumlah surat masuk yang telah dijawab paling lambat 4 hari kerja B = Jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang memerlukan jawaban Tujuan Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di BKN pusat maupun seluruh kantor regional I-XIV.
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Tinggi (X) Sedang () Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit Penanggung jawab IKP	Sekretariat Deputi
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Persuratan kedeputian Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi (X) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Resiko	Menurunnya kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan, tertundanya pengambilan keputusan, meningkatnya beban kerja administrasi, serta menurunnya citra, akuntabilitas, dan disiplin organisasi.
Mitigasi Resiko	Penerapan sistem monitoring digital, alur disposisi terstandar, notifikasi tenggat waktu, penguatan disiplin pegawai, optimalisasi sumber daya, serta evaluasi berkala guna memastikan kepatuhan terhadap SLA yang ditetapkan.

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	90%	93,83%	95%							

MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, meliputi : a. Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN. b. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN, bimbingan teknis dan advokasi kepada para pemangku kepentingan
Indikator Kinerja Program	IKP 5.Persentase capaian inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pembinaan di lingkungan Deputi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi Indikator ini mengukur persentase inovasi baik berupa kebijakan, sistem, metode, atau layanan yang diinisiasi dan berhasil diimplementasikan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembinaan manajemen ASN. Indikator ini mencerminkan komitmen Deputi dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) melalui inovasi yang relevan, aplikatif, dan berdampak nyata terhadap kinerja pembinaan instansi pemerintah. Adapun inovasi yang direncanakan sebagai berikut 1.Kegiatan promosi dalam kampanye ASN BerAKHLAK 2. Sistem pendaftaran uji kompetensi Jabatan Fungsional Manajemen ASN terintegrasi 3. Pengembangan sistem Penilaian Perilaku Kinerja Objektif pada Layanan e Kinerja BKN 4. Penguatan Layanan Pembinaan Pengembangan Talenta dan Karier Aparatur Sipil Negara 5. Formula Persentase Capaian Inovasi (%) = (A/B) x 100% Keterangan A = Inovasi yang terealisasi: Inovasi yang telah diimplementasikan dan memiliki bukti dukung (dokumen kebijakan, aplikasi, pedoman, pilot project, atau hasil evaluasi). B = Inovasi yang ditargetkan: Inovasi yang direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja pada periode yang sama.
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengatasi masalah, meningkatkan kualitas,efisiensi dan daya saing serta reputasi organisasi
Satuan Pengukuran	Paket
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(x) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk (X) Tidak diturunkan
Unit Penanggung jawab IKP	Sekretariat Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Inovasi deputi bidang pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Perhitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Resiko	Terjadi keterlambatan dalam memberikan pelayanan
Mitigasi Resiko	Pelaksanaan koordinasi internal terkait perencanaan dan pengembangan inovasi

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	100%	100%	100%							

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, meliputi : a. Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN. b. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN, bimbingan teknis dan advokasi kepada para pemangku kepentingan
Indikator Kinerja Program	IKP 6. Persentase instansi yang menerapkan manajemen kinerja ASN berbasis hasil dan outcome
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator ini mengukur persentase instansi pemerintah yang telah mengadopsi dan menerapkan sistem manajemen kinerja ASN yang berorientasi pada hasil (output) dan dampak (outcome). Penerapan ini mencakup keselarasan antara perencanaan kinerja individu dan organisasi, penetapan indikator kinerja yang terukur, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan pengembangan SDM aparatur.
	Formula
	Y = populasi Populasi adalah jumlah total instansi pemerintah dibagi 5 tahun $641/5 \text{ tahun} = 129$ $Y=129$ X = Jumlah instansi yang menerapkan kinerja berbasis hasil dan outcome yang berkategori BAIK dan SANGAT BAIK Formula = X/Y X = 80% dari Y $X = 80\% \times 129 = 103,2 = 104$
Tujuan	Meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja ASN yang berbasis hasil, dan kinerja organisasi yang berdampak
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Tinggi () Sedang (X) Rendah
Jenis Cascading IKP	() Lead input () Lead Proses (X) Lag Output () Lag Outcome
Metode Cascading	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Unit Penanggung jawab IKP	Tim Kerja Kebijakan Sistem Informasi Kinerja ASN
	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Sumber Data	Laporan monev penerapan manajemen kinerja ASN
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Ratarata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Resiko	Terdapat ketidakselarasan antara kinerja pegawai dengan kinerja organisasi
Mitigasi Resiko	Penyediaan pedoman perencanaan kinerja pegawai sebagai bentuk pembinaan

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisas
Tahunan	70%	75%	80%							

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, meliputi : a. Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN. b. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN, bimbingan teknis dan advokasi kepada para pemangku kepentingan
Indikator Kinerja Program	IKP 7. Persentase ASN yang sudah menggunakan Layanan E Kinerja Harian
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator ini mengukur persentase ASN yang telah menggunakan E Kinerja Harian pada aplikasi E Kinerja BKN.
	Formula
	Y = populasi Populasi adalah jumlah total ASN berdasarkan data SIASN pada periode pelaporan (desember 2026) X = 50% Formula = X/Y X = 50% dari Y
Tujuan	Penerapan pengisian e kinerja harian memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: a. Pencatatan aktivitas kerja ASN secara harian dan terukur b. Memastikan keterkaitan antara kinerja individu dan kinerja organisasi c. Penyediaan data real time untuk pemantauan dan evaluasi kinerja d. Mendukung penerapan flexible working arrangement (WFA)
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome () Outcome Antara (X) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	(x) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk (X) Tidak diturunkan
Unit Penanggung jawab IKP	Direktorat Kinerja dan Penghargaan ASN
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2024
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	() Hasil Perhitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Resiko	Mempengaruhi penilaian kinerja periodik bulanan dan triwulan secara objektif
Mitigasi Resiko	Intensifikasi pembinaan terkait penerapan layanan e kinerja harian pada aplikasi e kinerja harian BKN

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	N/A	N/A	50%							

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, meliputi : a. Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN. b. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN, bimbingan teknis dan advokasi kepada para pemangku kepentingan
Indikator Kinerja Program	IKP 8.Persentase Instansi yang telah Menyusun Kebutuhan Formasi dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Manajemen Aparatur Sipil Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi indikator ini mengukur persentase instansi pemerintah yang telah menyusun perencanaan kebutuhan formasi serta pola pengembangan karier Jabatan Fungsional Manajemen ASN secara sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan SDM aparatur yang profesional, kompeten, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta arah kebijakan manajemen ASN nasional. Formula Formula: Diukur berdasarkan persentase instansi pemerintah yang diberikan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional bidang manajemen ASN sesuai ketentuan. Target capaian tahun 2026 sebesar 100%. N = Persentase instansi yang diberikan rekomendasi kebutuhan dan penataan jabatan fungsional manajemen ASN A = Permohonan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional Manajemen ASN yang diajukan oleh instansi pengguna ditindaklanjuti dengan target 100% B = Pemberian rekomendasi penataan jabatan fungsional manajemen ASN bagi instansi yang dijadikan pilot project dengan target 100% $N = (A + B) / 2 \times 100\%$
Tujuan	Untuk memastikan tersedianya peta kebutuhan jabatan fungsional manajemen ASN yang akurat, terukur, dan berbasis kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah, sehingga perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penempatan, dan pembinaan jabatan fungsional manajemen ASN dapat dilakukan secara tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jenjang, serta mendukung peningkatan efektivitas manajemen ASN dan kinerja organisasi.
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(x) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan
Unit Penanggung jawab IKP	Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN
Sumber Data	Dokumen rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional manajemen ASN yang diberikan kepada instansi pemerintah.
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Perhitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Resiko	Belum optimalnya pemahaman instansi pemerintah terhadap penyusunan kebutuhan jabatan fungsional manajemen ASN berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja, keterlambatan penyampaian dokumen, serta adanya perbedaan interpretasi kebijakan antarinstansi.

Mitigasi Resiko	Menetapkan standar layanan pemberian rekomendasi, serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola rekomendasi agar proses penilaian dan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional manajemen ASN dapat dilaksanakan secara tepat waktu, konsisten, dan akuntabel.
-----------------	--

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	75%	134%	100%							

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul									
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, meliputi : a. Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN. b. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN, bimbingan teknis dan advokasi kepada para pemangku kepentingan									
Indikator Kinerja Program	IKP 9. Persentase Instansi yang telah menerapkan pembangunan citra institusi sesuai dengan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN									
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi									
	Indikator ini bermakna Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berintegritas, diperlukan upaya sistematis dalam membangun citra positif institusi pemerintah di mata masyarakat. Membangun citra institusi pemerintah yang kredibel, inklusif, dan berorientasi hasil, diperlukan pedoman yang mengatur strategi, tahapan, serta mekanisme penguatan citra melalui pengelolaan budaya kerja, komunikasi publik, dan kualitas layanan. Dalam mencapai indikator ini, pembinaan dilakukan dengan memberikan pendampingan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi									
	Formula									
	$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan penguatan citra institusi}}{\text{Jumlah populasi instansi pemerintah}} \times 100$									
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman instansi pemerintah dalam menerapkan penguatan citra institusi ASN sesuai dengan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN.									
Satuan Pengukuran	Persen									
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya									
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome () Outcome Antara (X) Output Kendali Rendah									
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading									
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk (X) Tidak diturunkan									
Unit Penanggung jawab IKP	Direktorat Pengembangan Talenta dan Karir									
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2024									
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata									
Status Data	() Hasil Perhitungan Raw Data (X) Raw Data									
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize									
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan									
Resiko	Tidak tercapainya persentase instansi yang menerapkan pembangunan citra institusi sesuai nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku akibat belum optimalnya penguatan budaya kerja.									
Mitigasi resiko	Melakukan pendampingan secara sistematis kepada instansi dalam penguatan budaya kerja yang selaras dengan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku guna memastikan pembangunan citra institusi									
Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	N/A	N/A	40%							

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Talenta dan Karier ASN Berbasis Manajemen Talenta
Deskripsi Sasaran Program	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan manajemen talenta yang berdampak pada implementasi manajemen talenta bermakna memastikan terlaksananya kegiatan pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan manajemen talenta di lingkungan instansi. Pembinaan ini mencakup penguatan kapasitas, pemantauan, evaluasi, dan pemberian arahan teknis kepada unit-unit kerja terkait agar proses manajemen talenta dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten.
Indikator Kinerja Program	IKP 10. Persentase instansi yang telah menerapkan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi Indikator ini mengukur persentase K/L/D yang telah mengimplementasikan manajemen talenta ditandai dengan telah disetujuinya Surat Keputusan Kepala BKN tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Instansi Pemerintah. Adapun SK tersebut didapatkan sebagai hasil ekspose manajemen talenta instansi atas progres pembangunan manajemen talentanya. Formula $\% \text{ instansi yang menerapkan manajemen talenta} = \left(\frac{\text{Jumlah K/L/D yang mendapatkan SK Kepala BKN tentang Persetujuan Manajemen Talenta}}{\text{Total K/L/D}} \right) \times 100\%$
Tujuan	Untuk mendorong semakin banyak instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun manajemen talenta secara terstruktur, sehingga mampu memastikan identifikasi, pengembangan, dan penempatan pegawai yang tepat sesuai potensial dan kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome (X) Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk (X) Tidak diturunkan
Unit Penanggung jawab IKP	Direktorat Pengembangan Talenta dan Karir, serta Kantor Regional
Sumber Data	Laporan pembinaan penerapan manajemen talenta di instansi pemerintah dari BKN Pusat dan BKN Kanreg/Dasbor Pemetaan Penerapan Manajemen Talenta Instansi
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	() Hasil Perhitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Resiko	Tidak Optimalnya penerapan sistem merit, khususnya dalam pengembangan karier, perencanaan suksesi dan pengisian jabatan, dapat menghambat pemanfaatan talenta unggul
Mitigasi Resiko	Pembinaan yg lebih intensif berupa pendampingan teknis, coaching clinic dan konsultasi implementasi serta pemetaan permasalahan dan tingkat kematangan penerapan manajemen talenta sebagai dasar intervensi yang lebih tepat sasaran

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	50%	53,04%	87,86%							

LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran
Indikator Kinerja Program	IKP 11. Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
	Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
	SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN.
	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Deputi Bidang PPM ASN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Deputi Bidang PPM ASN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Formula
	Hasil penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Kepka Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan BKN
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Deputi Bidang PPM ASN; 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Deputi Bidang PPM ASN; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Deputi Bidang PPM ASN; 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Buat Baru
Unit Penanggung jawab IKP	Sekretariat Deputi
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat BKN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Perhitungan Raw Data () Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Resiko	Realisasi capaian Indikator kinerja kegiatan tidak tercapai
Mitigasi Resiko	Menyelaraskan dokumen AKIP (Renstra, Renja, manual IKK/IKP, rencana target IKK/IKP, rencana aksi IKK/IKP, menindak lanjut dari rekomendasi LHE tahun 2025 yang telah dilakukan, dan berkoordinasi secara intensif dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta Inspektorat

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	74	70,25	74							

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan sumber daya manusia BKN yang andal dan berorientasi kinerja bermakna bahwa BKN mampu menjadi organisasi dan mewujudkan sumber daya manusia BKN yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan berorientasi kepada kontribusi bagi kinerja organisasi mendukung pembangunan nasional, bukan sebatas mencapai output. Sasaran ini merupakan capaian dalam melihat sumber daya manusia BKN yang kompeten dan akuntabel
Indikator Kinerja Program	IKP 12. Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator Kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melihat rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang PPM ASN
	Formula
	Membandingkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sudah ditetapkan dengan yang sudah terlaksana $N = \frac{A}{B} \times 100$ N = Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Deputi Bidang PPMASN A = Jumlah Kegiatan Rencana Aksi RB yang telah dilaksanakan B = Jumlah Kegiatan Rencana Aksi RB yang direncanakan
Tujuan	Sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru
Unit Penanggung jawab IKP	Sekretariat Deputi
Sumber Data	Laporan Moner Rencana Aksi RB dari Unit Kerja di Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	() Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Resiko	Rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang PPMASN tidak terlaksana
Mitigasi Resiko	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi per TW

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	100%	100%	100%							

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran
Indikator Kinerja Program	IKP 13. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dilingkungan kedeputian Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja.
	Formula
	Membandingkan antara jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian dengan jumlah pegawai di unit kerja. $N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Deputi bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN A = Jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN B = Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Tujuan	Untuk mengetahui kepatuhan dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Deputi bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome (X) Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru
Unit Penanggung jawab IKP	Sekretariat Deputi
Sumber Data	Rekapitulasi Pengisian Kinerja Harian Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Resiko	Target Kinerja harian tidak tercapai 100%

Mitigasi Resiko	Mengingatkan pegawai untuk mengisi ekinerja (misalnya lewat WA grup)									
Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	100%	90,86%	100%							

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1**

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel bermakna pengelolaan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Keuangan
Indikator Kinerja Program	IKP 14. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN memperlihatkan seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran $PA = \frac{Ai}{An} \times 100\%$ Ket: PA = Persentase realisasi penyerapan anggaran Ai = Jumlah serapan anggaran dan fisik An = Perencanaan anggaran dan fisik
Tujuan	Untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran maupun fisik yang sudah direncanakan sebelumnya
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru
Unit Penanggung jawab IKP	Sekretariat Deputi
Sumber Data	Laporan hasil penyerapan anggaran dan fisik keseluruhan unit di Deputi Bidang PPMASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir () Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Resiko	Jika tidak melakukan penghitungan, maka tidak diketahui efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran program di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Mitigasi Resiko	Adanya <i>timeline</i> sebagai bentuk pemantauan terhadap ketepatan pelaksanaan atas rencana aksi kegiatan yang telah disusun

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	99%	99,9%	99%							

MANUAL INDIKATOR KINERJA
LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Sasaran terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu menggambarkan laporan keuangan di BKN harus dilaporkan secara akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik secara anggaran maupun nilai fisiknya, transparan yaitu dipublikasikan kepada publik, dan tepat waktu yaitu sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan
Indikator Kinerja Program	IKP 15. Rasio temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2026 di lingkungan kedeputian PPMASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Suatu instrumen yang menggambarkan tindak lanjut (sampai dengan selesai) yang dilakukan oleh unit kerja di Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN atas temuan hasil audit/pemeriksaan keuangan, operasional dan kinerja.
	Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh APIP. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern.
	Semakin kecil rasio temuan yang terjadi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan, operasional, dan pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, karena menunjukkan kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
	Formula
	Membandingkan jumlah temuan yang statusnya telah tuntas/selesai ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh temuan dari BPK dan inspektorat.
	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$
	N = Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN A = Jumlah temuan yang statusnya telah Tuntas/Selesai ditindaklanjuti di Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN B = Jumlah temuan dari BPK dan Inspektorat di Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Tujuan	Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu unit kerja di Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam memperbaiki tata kelola
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome () Outcome Antara () Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	☒ Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit ☒ Komponen Pembentuk () Buat Baru
Unit Penanggung jawab IKP	Sekretariat Deputi

Sumber Data	Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan Oleh BPK/Inspektorat
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir (X) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Resiko	Jika tidak melakukan penghitungan, tidak diketahui kepatuhan unit terhadap rekomendasi temuan BPK/Inspektorat
Mitigasi Resiko	Perbaiki Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan sesuai dengan catatan maupun Nota Dinas Biro Keuangan

Tabel Data										
Periode pelaporan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	0	0	0							

Mengetahui
Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN,

\$